

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 April 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MASMANSUR**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **744713**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **5.077.700.000**

1. Tanah Seluas 396 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 250 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 303 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 580 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 947 m2/300 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 1.597.700.000
6. Tanah Seluas 1079 m2 di SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 3597 m2 di SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah Seluas 8448 m2 di SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
9. Tanah Seluas 4730 m2 di SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
10. Tanah Seluas 1350 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **918.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, TOYOTA TRUCK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.



300.000.000

4. MOBIL, MITSUBISHI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

300.000.000

5. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000

6. MOTOR, MIO MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 256.244.802

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 6.251.944.802

III. HUTANG

Rp. 369.061.761

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.882.883.041

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.